

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Manchester City sebuah klub sepak bola Inggris yang bermain di Liga Premier Inggris. Klub ini adalah rival sekota Manchester United, namun prestasi mereka tidak segemerlap rivalnya. *City* bermarkas di stadion City of Manchester, Manchester¹.

Tahun 2007 klub di beli oleh milyarder Thailand yang juga mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, sehingga klub ini menjadi salah satu klub Inggris yang dimiliki oleh pihak asing. Tidak tanggung-tanggung, Thaksin membeli 75% saham dari klub ini.

Keputusan Takhsin Shinawatra ini, mengundang kontroversi di kalangan industri olahraga maupun di kalangan perpolitikan tingkat dunia. Di tengah keterpurukannya atas tuduhan korupsi, Thaksin masih berani mengambil langkah untuk membeli sebagian besar saham Klub sepakbola bergengsi seri Liga Inggris, Manchester City.

Thaksin berani mengeluarkan dana sebesar 82 juta poundsterling untuk membeli Klub tersebut, belum lagi untuk pembelian pemain dan juga pelatih. Thaksin mempercayakan Klubnya kepada Sven Goran Eriksson,

¹ Wikipedia Indonesia *Manchester City Football Club*, 27 September 2007.

pelatih asal Swedia untuk melatih timnya. Thaksin menjanjikan 50 juta poundsterling kepada Eriksson.

Kontroversi di kalangan industri olahraga dan perpolitikan dunia tersebut menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah penelitian ilmiah atau skripsi dengan judul “*Tujuan Politik Thaksin Shinawatra dalam Pembelian Club Manchester City*”.

B. Latar Belakang Masalah.

Thailand adalah salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara, yang berbatasan langsung dengan Myanmar, Laos, Kamboja dan Malaysia. Thailand adalah satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Bangsa Eropa maupun kekuasaan asing lainnya. Bentuk Negara ini adalah Monarki Absolut sejak tahun 1782 sampai 1932. Ketika terjadi pemberontakan dan perebutan kekuasaan, bentuk Negara Thailand berubah menjadi Monarki Konstitusional. Sejak saat itu, Thailand dikuasai oleh banyak pemerintahan, baik sipil maupun militer. Negara ini dulu dikenal sebagai Muang Thai sampai 1939, dan berubah nama menjadi Thailand di tahun 1949².

Setelah kepemimpinan Chuan Leekpai, pemerintahan digantikan oleh Thaksin Shinawatra di tahun 2001. Selama lima tahun kepemimpinan Thaksin, banyak pertentangan yang timbul akibat dari kebijakan yang dikeluarkannya, terlebih kebijakannya dalam penjualan saham telekomunikasi sebesar 49.6%.

² Microsof Student 2007 *Thailand*

Masa pemerintahan Thaksin ini berakhir dengan kudeta militer pada tahun 2006³.

Terlepas dari itu, hubungan suatu antar elit politik juga memerlukan diplomasi sebagai seni mengedepankan kepentingan. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan dianggap efektif untuk mencapai kepentingan nasional suatu bangsa karena pelaksanaannya dilakukan secara damai tanpa ada unsur pemaksaan. Kebudayaan seperti diketahui memiliki arti yang luas karena sebagai dimensi yang makro, kebudayaan bukan sekedar suatu kesenian atau adat istiadat saja tetapi juga merupakan segala bentuk hasil dan upaya manusia. Secara harfiah kata budaya sendiri mengandung arti ‘budi’ dan ‘akal’, baik yang terjabar sebagai ‘daya dari budi’ yang berupa cipta, rasa, karsa, maupun sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa itu sendiri⁴. Banyak negara-negara yang berusaha untuk mendapatkan pengakuan melalui jalan diplomasi kebudayaan ini, misalnya saja melalui kesenian, pertukaran pelajar, olahraga dan lain-lain. Adapun salah satu sarana yang dapat dipakai untuk mewujudkan diplomasi kebudayaan ini adalah dengan olahraga, dimana cara ini sangat potensial karena semua masyarakat luas dapat berperan didalamnya. Sepak bola sebagai salah satu kebanggaan disemua Negara khususnya Thailand karena sepakbola merupakan olah raga kebanggaan di benua Eropa dan Asia.

³ Microsoft Student 2007 *Thailand-Thaksin's Resignation*

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.181

Setelah terguling sebagai Perdana Menteri Thailand, beberapa waktu belakangan nama Thaksin sedikit jarang terdengar lagi di kancah Internasional. Setelah beberapa waktu vakum dari dunia politik, bulan Agustus tahun 2007 lalu Thaksin membuat gebrakan baru, Thaksin dinyatakan sebagai pemilik baru klub sepakbola Inggris Manchester City. Thaksin membeli 75% saham dari klub tersebut, dengan kepemilikan saham 75% tersebut, berarti Thaksin Shinawatra menjadikan Manchester City sebuah klub milik pribadi Thaksin.

Thaksin mengeluarkan dana sebanyak 82 poundsterling untuk dapat memiliki 75% saham Manchester City⁵, belum lagi dana yang harus dia keluarkan untuk membeli pemain-pemain baru untuk bermain dalam klub-nya. Tapi apa yang dikeluarkannya diharapkan akan sebanding dengan apa yang akan didapatkannya. Nama Thaksin tidak akan hilang walaupun dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.

Menjadi pemilik sebuah klub sepak bola Liga Inggris adalah sebuah *prestige* yang luar biasa. Terutama bagi seseorang seperti Thaksin yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, karena sejauh ini hanya pengusaha yang berasal dari AS dan Eropa serta Timur Tengah yang dipertimbangkan sebagai pemilik klub-klub sepak bola di Inggris. Meskipun Thaksin telah dinyatakan sebagai tersangka oleh Mahkamah Agung Thailand pada 14 Agustus 2007 lalu, dan telah dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mantan

⁵ Pikiran-rakyat.co.id *Manchester City dan "Kendaraan" Thaksin* - 4 Juli 2007

Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan istrinya, atas tuduhan korupsi, pemerintah Thailand juga mengumumkan pembekuan dananya di sejumlah bank di seluruh dunia, tetapi hebatnya Thaksin Shinawatra tetap mampu membeli Manchester City.

Oleh karena itu berapapun dana yang Thaksin keluarkan, memiliki klub sepakbola bergengsi sekelas Manchester City, merupakan investasi yang tidak dapat dilewatkan. Keberhasilannya mendapatkan Manchester City adalah kemenangan kecil atas junta militer Thailand saat ini. Karena dengan tindakan yang diambilnya dalam pembelian Club Manchester City ini, Thaksin setidaknya dapat meredam sedikit masyarakat penggemar bola di Thailand yang pada waktu kudeta maupun sebelumnya telah menentang Thaksin, untuk berbalik mendukung tindakan yang dimbilnya.

Meskipun Thaksin menyatakan diri untuk mundur dari dunia politik, tapi fakta berbicara lain. Buktinya, pada pemilu Thailand kemarin, partai yang dipimpin Thaksin Shinawatra, *Thai Rak Thai (TRT)* masih dapat memenangkan pemilu. Tidak hanya itu, berdasarkan sumber media massa, banyak petani di provinsi kaya padi Roi Et yang masih merindukannya. Para petani disana mengaku, mereka tidak percaya terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh militer dan ingin tetap mendukung partai pro- Thaksin.⁶ Mereka bahkan mengumpulkan uang sampai 20 ribu bath atau setara dengan US \$ 600,

⁶<http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2007/12/12/brk,20071212-113428.id.html>
– *Thaksin Shnawatra masih dirindukan*, diakses pada tanggal 19 April 2008 pukul 10.18 WIB

yang digunakan untuk membelikan tiket pesawat Thaksin untuk kembali dari London⁷.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dengan mengingat keterkaitan dengan judul proposal skripsi ini, maka permasalahan yang penulis ajukan adalah “*Mengapa Thaksin Shinawatra Membeli Club Manchester City?*”

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Persepsi atau Citra

Menurut Kenneth Boulding, naluri dan kepribadian adalah segi-segi individual yang bersifat statik, sedangkan persepsi atau “*citra*” yang dimiliki individu bersifat dinamik, karena persepsi seringkali berubah. Ketika bereaksi dengan terhadap dunia sekitar, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia itu sendiri mungkin berbeda.

Orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka “ketahui” Tanggapan orang terhadap situasi suatu negara tergantung bagaimana ia mendefinisikan teori tersebut.

“suatu citra adalah ungkapan sederhana tentang realitas yang berfungsi sebagai pengendali mental. Agresor adalah penindas yang mempergunakan ancaman dan tindakan-tindakan militer untuk menundukan negara-negara yang lebih lemah dan untuk merebut berbagai kekayaan yang ia inginkan dari tangan mereka. Ia kebal terhadap pertimbangan keadilan yang normal dan melihat hukum dan moralitas

⁷ Ibid.

internasional tidak lebih dari sentimentalitas. Nafsu ekspansinya tidak akan terpuaskan, apalagi jika ditujukan suatu ideology mesianis (dianggap suci), dan keberhasilan satu penaklukan tidak akan meredakan nafsunya. Ia licik dalam menggunakan propaganda untuk menyembunyikan maksud-maksudnya, dan ia memandang persetujuan dan perjanjian lebih dari sebagai taktik ketimbang kewajiban”⁸

Para pembuat keputusan, seperti halnya manusia lainnya dipengaruhi oleh berbagai proses psikologik yang mempengaruhi persepsi (misalnya, kehendak untuk merasionalisasikan tindakan, untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk kepentingannya dan sebagainya) dan proses psikologik lain yang membentuk kepribadian.

Mula – mula keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya untuk menentukan apa stimulasinya, apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan. Kemudian berdasar sikap citra yang telah dipegangnya selama ini, stimulus dipresentasikan. Dalam hal ini terdapat dua jenis citra, yaitu terbuka dan tertutup. Citra yang terbuka menerima semua jenis informasi yang baru, sedangkan citra yang tertutup karena alasan-alasan psikologik menolak perubahan dan karenanya mengabaikan saja informasi yang bertentangan dengannya. Tapi baik citra yang terbuka ataupun tertutup, keduanya berfungsi sebagai saringan setiap orang yang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk, persepsi yang didasarkan pada citra yang sudah ada sebelumnya adalah proses seleksi. Sistem keyakinan adalah sekumplan keyakinan citra atau model tentang citra yang dianut

⁸ Jones S Walter, *logika Hubungan Internasional : “Persepsi Nasional”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 57

seseorang. Karena membantunya berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi sebagai penutup tindakan, menentukan tujuan dan bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dan setiap situasi.

Menurut Ole R. Holsty, reaksi atau tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh cara ia melihat, menafsirkan dan menilai lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Persepsi itu selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang mengartikulasikan situasi yang dihadapinya apakah situasi itu baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan, dan lain-lain, juga mengandung keyakinan dasar yaitu keyakinan tentang suatu hal yang dianggap benar meskipun kebenaran itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya.⁹

Dengan konsep citra ini, penulis bermaksud menempatkan tujuan Thaksin Shinawatra dalam pembelian Manchester City untuk meraih kembali *image* sosial dan politik yang sempat hilang sewaktu kudeta militer 2006 lalu, dan juga tuduhan korupsi atas dirinya.

Seperti tips yang diberikan oleh Roman Abramovich, orang Rusia yang memiliki Klub Chelsea. Bisa dibayangkan, dialah yang menggunakan jalan mengangkat popularitas atas dirinya dengan jalan pembelian klub sepak bola Internasional. Diakui oleh penasihatnya sendiri, pembelian klub oleh Abramovich merupakan jalan supaya Abramovich bisa lebih

⁹ Ole R. Holsty, *Foreign Policy Formation Viewed Cognitive*, dalam Axelrod (ed.), *Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites*, Princeton University Press, Princeton 1979, hal 19-20

dikenal di dunia Internasional, tidak hanya di Rusia, dan cara ini rupanya ditiru oleh Thaksin Shinawatra.

2. Suaka (*Asylum*)

Kata "*asylon*" dalam bahasa Yunani atau "*asylum*" dalam bahasa latin berarti "sebuah tempat terhormat dimana seorang yang sedang dikejar berlindung. Berdasarkan alasan baik itu agama dan sipil, hak memberikan perlindungan ini diberikan kepada tempat-tempat ibadah dan kepada Negara terhadap seorang warga negara asing yang berada dalam status buronan tanpa mempertimbangkan jenis perbuatan kriminal atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Sehingga, dalam waktu yang lama, kejahatan-kejahatan umum (*ordinary crime*) tidak dapat diekstradisi-kan. Baru sejak abad ke tujuh belas beberapa ilmuwan termasuk ahli hukum dari Belanda Hugo Grotius membedakan antara kejahatan bersifat politik dan kejahatan umum, selanjutnya status *Asylum* hanya dapat digunakan oleh mereka yang menghadapi penuntutan (*prosecution*) karena alasan politik dan keagamaan. Sampai dengan pertengahan abad ke sembilan belas hampir semua Perjanjian Ekstradisi mengakui prinsip Non-Ekstradisi terhadap pelaku kejahatan politik, namun dengan pengecualian terhadap mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan terhadap Kepala Negara"¹⁰.

¹⁰ Aga Khan, Sadruddin, "United Nations High Commissioner for Refugees", Lectures on Legal Problems relating to Refugees and Displaced Persons, given at the Hague Academy of International Law, 4-6 August, p.24, sebagaimana dikutip oleh Enny Soeprapto, "International Protection of Refugees and Basic Principles of Refugee Law, an Analysis", Makalah, 1989, hal. 38

Asylum adalah sebuah lembaga yang lahir karena kemanusiaan (humanitarian) dan juga hukum (*legal nature*). *Asylum* merupakan lembaga kemanusiaan karena dimaksudkan untuk menyelamatkan seseorang dari penuntutan atau kemungkinan penuntutan. *Asylum* juga merupakan instrumen hukum karena sekali *Asylum* diberikan maka seseorang yang mendapatkan status sebagai penerima suaka (*asylee*) akan melekat padanya hak dan kewajiban yang dapat dijalankan dan dipaksakan oleh Negara pemberi *Asylum* berdasarkan hukum nasionalnya ataupun berdasarkan aturan Hukum Internasional dan atau aturan hukum regional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat¹¹.

Sampai saat ini dalam instrumen Hukum Internasional tidak terdapat satu definisi yang diterima secara umum mengenai pengertian *Asylum*, namun demikian sebagai langkah awal *Institute of International Law*¹² dalam sebuah sesi pertemuannya di Bath, tahun 1950, mencoba mendefinisikan pengertian *Asylum* sebagai berikut:

”*Asylum is the protection which a State grants on its territory or in some other places under the control of its organs, to a person who comes to seek it*”. Pengertian yang hampir sama diberikan oleh Sumaryo Suryokusumo¹³, sebagai berikut:

¹¹ Enny Soeprapto, *Ibid.* hal. 40

¹² Enny Soeprapto, *Ibid.* hal. 39

¹³ Sumaryo Suryokusumo, “*Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*”, Penerbit Alumni, Bandung, 1995, hal. 163

”Suaka adalah dimana seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara maupun didalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana dia berasal”.

Nampak bahwa dari kedua pengertian diatas secara tegas mengandung dua jenis suaka, yaitu suaka territorial dan diplomatik. Sedangkan menurut Sulaiman Hamid¹⁴:

”Suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya dan alasan mengapa individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya”.

Sementara itu J.G. Starke¹⁵ menulis bahwa konsep *Asylum* dalam Hukum Internasional mengandung setidaknya dua elemen, yaitu : a). Tempat perlindungan (*shelter*), yang bukan hanya sekedar tempat berlindung sementara; dan b). Sebuah usaha perlindungan aktif (*active protection*) sebagai bagian dari kewenangan pemegang kekuasaan di wilayah teritorial dimana *Asylum* tersebut diberikan. Pemberian *Asylum* dapat berupa territorial (internal), contohnya diberikan oleh sebuah Negara pemberi suaka (*asylum-granting state*) dalam wilayah teritorialnya; atau dapat juga berupa *extra-terroitorial*, contohnya diberikan oleh utusan diplomatik/kedutaan, gedung konsuler, markas

¹⁴ Sulaiman Hamid, ”*Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 46

¹⁵ Starke, J.G., “*An Introduction to International Law*”, Eighth Edition, London, Butterworths, 1977, p. 387

besar organisasi internasional, kapal perang, kapal-kapal dagang kepada pengungsi (*refugee*) yang berasal dari Negara yang berkuasa di wilayah teritorial dimana utusan diplomatik/kedutaan, gedung konsuler, markas besar organisasi internasional, kapal perang dan kapal-kapal dagang tersebut sedang berada. Pada prinsipnya setiap negara mempunyai hak penuh untuk memberikan suaka teritorial (*territorial asylum*), kecuali kalau negara dimaksud telah menerima suatu pembatasan tertentu melalui sebuah traktat atau perjanjian Internasional lainnya. Suaka teritorial adalah suatu kenyataan bahwa kekuasaan pemberian suaka teritorial merupakan pelaksanaan kedaulatan wilayah oleh negara penerima suaka.

3. Teori Migrasi Politik

Migrasi politik adalah migrasi sistim politik terutama didorong oleh politik kepentingan. migrasi politik biasanya terjadi pada salah satu dari dua kepentingan dan tergantung pada kekuatan pendorong terjadinya migrasi politik¹⁶. Migrasi politik berbeda dari jenis migrasi lainnya, migrasi politik adalah upaya untuk mengubah aspek dari sebuah sistem sosial politik. Perubahan tersebut dicapai oleh memodifikasi politik demografis dari wilayah tertentu dalam pencapaiannya migrasi politik bisa dilakukan melalui berbagai cara.

Persoalannya, seberapa jauh bakal calon itu mampu mengakumulasikan persoalan masyarakat lokal, mengingat sebagian besar

¹⁶ Steven Hahn, *A Nation Under Our Feet: Black Political Struggles in the Rural South, from Slavery to the Great Migration*, Harvard University Press (2003)

umur dan pengalaman karir berlangsung di kota sehingga penguasaan terhadap masalah kota cenderung dominan ketimbang masalah daerah asalnya.

Berdasarkan ketentuan Deklarasi tentang Migrasi politik 1967, Kovensi PBB tentang Status Pengungsi 1951 yang telah menjadi hukum nasional dan ketentuan khusus dalam hukum keimigrasian, tidak terdapat satupun ketentuan yang secara tegas memberikan hak kepada Migrasi politik untuk dapat melakukan kegiatan politik baik secara aktif membentuk kelompok politik tertentu dan menjadi anggotanya maupun secara pasif dengan memberikan dukungan diam-diam terhadap kelompok dengan kepentingan politik tertentu. Bahkan Pasal 15, Kovensi PBB tentang Status Pengungsi 1951 secara tegas membatasi bahwa pengungsi dan penerima suaka hanya dapat membentuk organisasi yang bersifat non-politik dan bukan politik. Sesuai dengan dasar pemberiannya bahwa suaka merupakan pelaksanaan kedaulatan negara dan karena alasan kemanusiaan maka tidak terdapat dasar apapun bagi penerima suaka untuk menggunakan lembaga suaka ini sebagai alat dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya.

Sebagai perbandingan, larangan mengenai kegiatan yang bersifat politik, separatis dan subversif secara tegas diatur oleh beberapa negara-negara di Afrika yang tergabung dalam Organisation of African Unity melalui Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa.³⁰ Ketentuan ini secara tegas diatur dalam:

“Article 3 Prohibition of Subversive Activities

1. Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conforms with its laws and regulations as well as with measures taken for the maintenance of public order. He shall also abstain from any subversive activities against any Member State of the OAU.
2. Signatory States undertake to prohibit refugees residing in their respective territories from attacking any State Member of the OAU, by any activity likely to cause tension between Member States, and in particular by use of arms, through the press, or by radio”.

E. Hipotesa

Berdasarkan latarbelakang dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Thaksin Shinawatra membeli Club Manchester City terutama adalah tujuan politik, yakni untuk memperbaiki citra atas dirinya yang bertujuan untuk menaikkan kembali popularitasnya sebagai *public figure*, supaya masyarakat yang pada awalnya menentang Thaksin Shinawatra berbalik mendukungnya.
2. Tujuan lain Thaksin Shinawatra membeli Club Manchester City adalah agar pemerintahan Inggris mengabulkan suaka politik yang diajukannya.

F. Tujuan Penulisan

1. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata I dari Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat menjawab tujuan apa yang membuat Thaksin memutuskan untuk membeli Club Manchester City dengan dana yang tidak sedikit.
3. Penulisan adalah sarana penerapan teori pemikiran ilmuan yang telah didapat penulis selama kuliah.

G. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, batasan yang diberikan antara tahun 1982 pada saat Thaksin Shinawatra memulai kariernya di bidang bisnis, sampai dengan saat ini, dimana penelitian masih dilakukan.

Pada tahun 2006 lalu, Thaksin mendapatkan kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Shanti Boonyaratglin. Meskipun demikian, tidak diabaikan data-data serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di waktu lain yang relevan dan diperlukan untuk mendukung penelitian.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data *Library research* atau studi kepustakaan, dengan mendapatkan data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian,

diantaranya melalui buku, jurnal, surat kabar, majalah, informasi dari internet serta berbagai literatur lainnya.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Menjelaskan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Memaparkan ringkas biografi Thaksin Shinawatra terutama bidang politik dan bisnis sampai tahun 2007 dan Pudarnya legitimasi Thaksin Shinawatra pada peristiwa kudeta militer tahun 2006.

BAB III : Pembelian Manchester City Dalam Memperbaiki Citra Thaksin Shinawatra Sebagai *Public Figure*

BAB IV : Suaka Politik Thaksin Dibalik Pembelian Klub Manchester City

BAB V : Kesimpulan.